

UU DESA DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN

Course Title : UU Desa dan Kemandirian Masyarakat
Desa
Lecturer : Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si
ace.hasan@gmail.com
: Facebook: acehasansyadzily
Twitter: acehasan76



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN – JAKARTA
2020

Mengapa Lahir UU Desa?

- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa lahir untuk merumuskan dengan jelas mengenai otonomi desa dan kemandirian desa yang belum diatur dalam UU sebelumnya (UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)
- Mendorong praktik demokrasi desa
- Mendorong cita-cita desa yang mandiri dan sejahtera
- Pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan



Asas pengaturan desa dalam uu desa



Landasan UU desa

Historis: Desa merupakan entitas yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat

Filosofis: Desa merupakan tata pemerintahan yang sudah "sangat tua" sehingga dapat menjadi ujung tombak penyelenggara pemerintahan

Yuridis: Pasal 18b UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemda yang bersifat khusus dan istimewa

Sosiologis: Dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran dilakukan melalui paradigma pembangunan dari bawah (desa). Pembangunan tidak saja berorientasi kota tetapi juga desa (Debora, 2019: 5)

Tipologi Desa



Desa sangat tertinggal dan tertinggal (kurangnya sarana dan prasarana dasar, serta kebutuhan pembentukan usaha ekonomi)



Desa berkembang (pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penguatan usaha ekonomi pertanian)



Desa maju/mandiri (peningkatan kualitas pelayanan dasar publik. Perluasan usaha ekonomi pertanian)



Dana desa



- Dalam rangka mendukung kemandirian desa, UU Desa mengamanatkan kucuran dana langsung dari APBN



- Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan diprioritaskan untuk **pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**



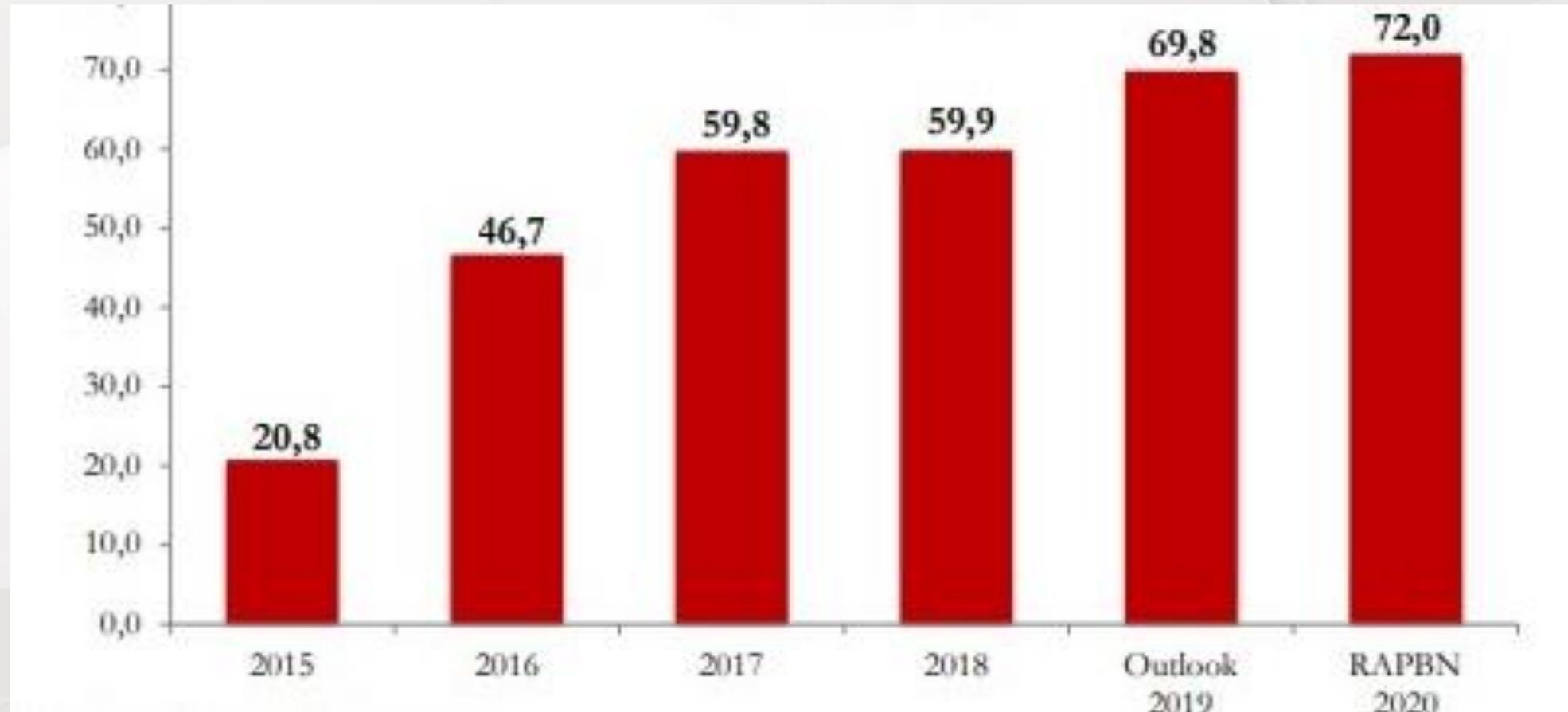
- Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK



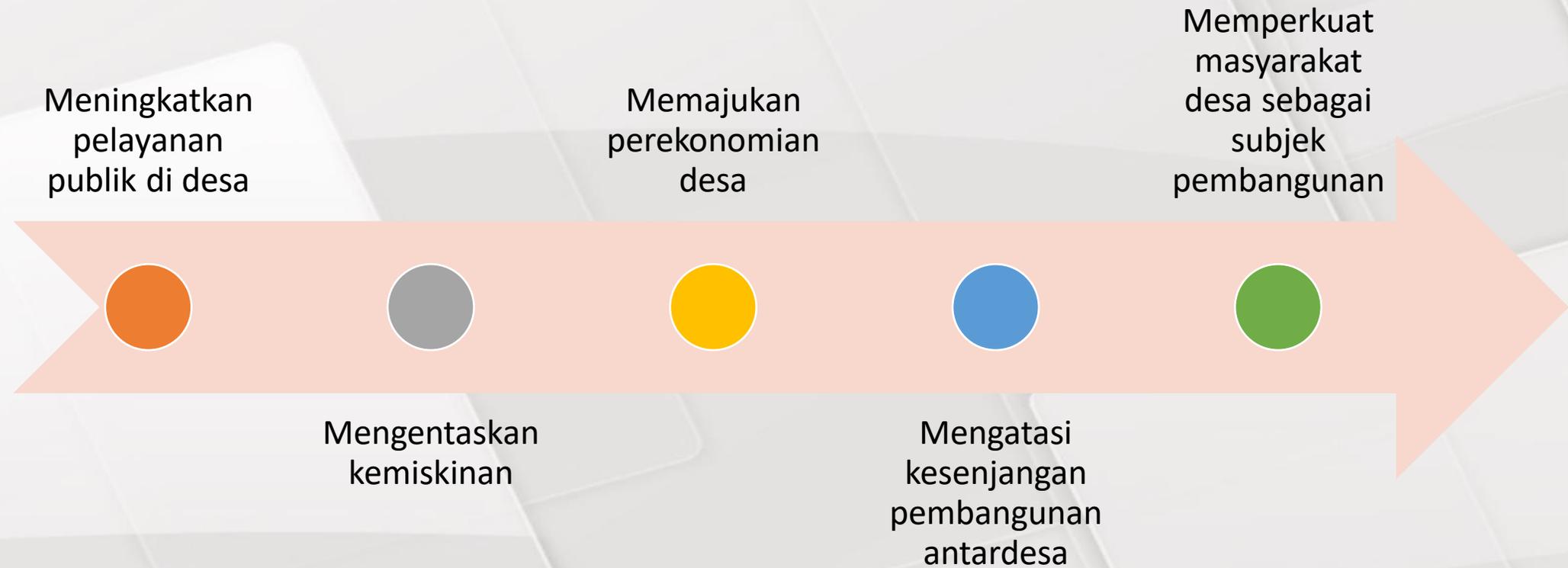
- Rumusan dan besaran dana desa ditentukan berdasarkan geografis, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di sebuah desa

Dana desa 2015-2020

(dalam triliun)



Tujuan dana desa



Sumber pendapatan desa



Prinsip Penggunaan dana desa



Keadilan.
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis.



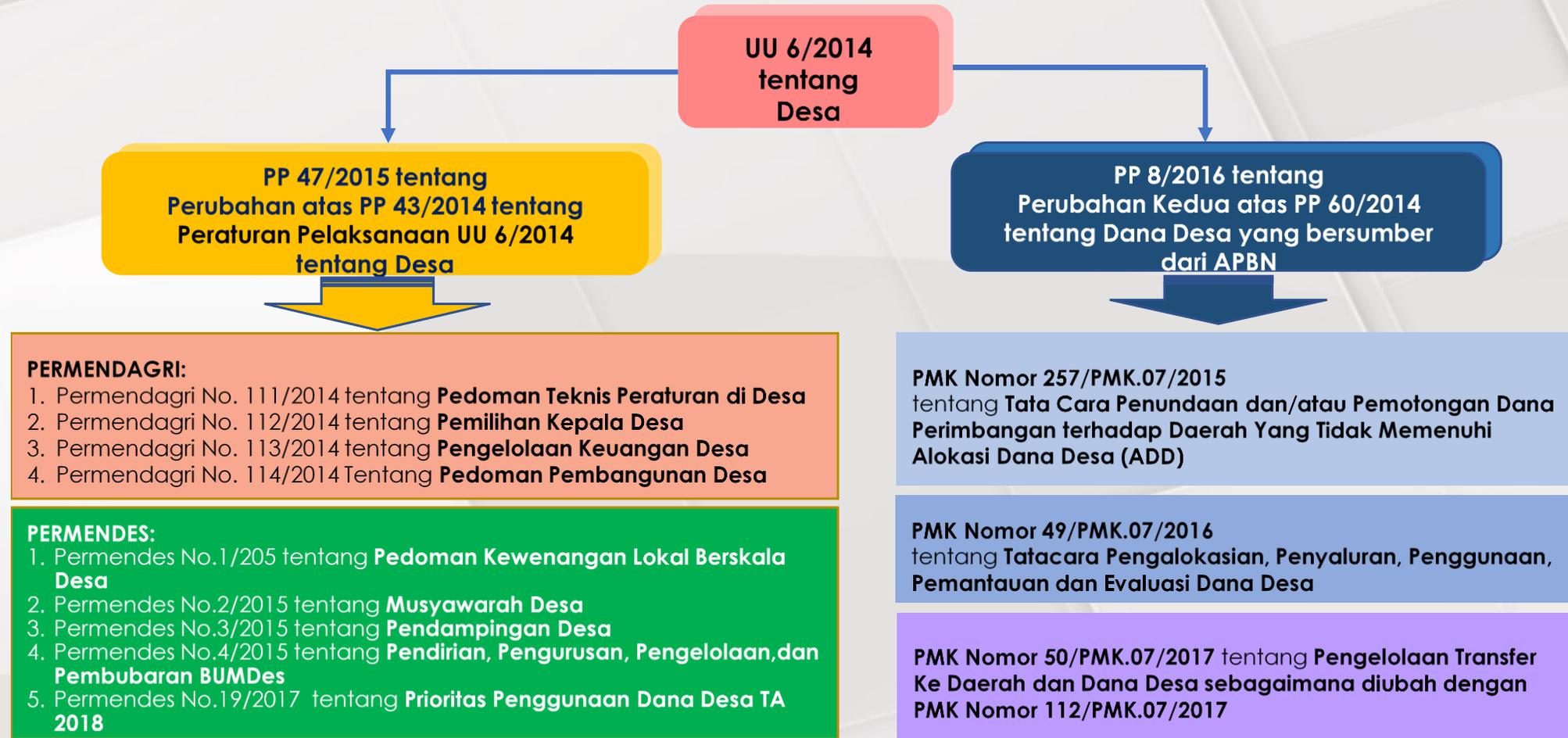
Kebutuhan prioritas.
Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak.



Kewenangan desa.
Mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal



DASAR HUKUM PENGATURAN DESA DAN DANA DESA

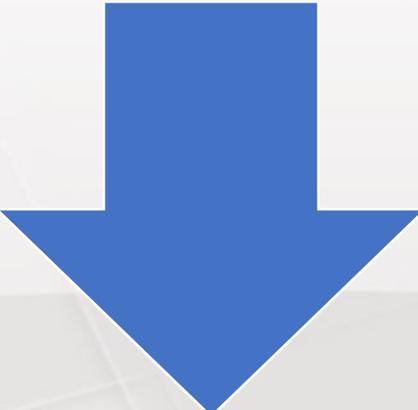


Perka LKPP no 13/2013 /2015 tentang **Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa** sebagaimana **diubah Perka LKPP no 22/2015**

Badan usaha milik desa (Bumdes)



Desa dapat mendirikan BUMDES yang menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum.



Pendirian BUMDES melalui musyawarah desa (Mudes)



Manfaat BUMDES

1. Pengembangan usaha

2. Pembangunan desa

Hasil usaha BUMDES dapat dimanfaatkan untuk

3. Pemberdayaan masyarakat

4. Pemberian bantuan masyarakat miskin

Dukungan Pemerintah



Memberikan hibah dan atau akses permodalan



Melakukan pendampingan dan akses ke pasar



Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa

Success story desa ponggok, Klaten, jawa tengah

- ❖ Desa ponggok pada 2004 merupakan daerah termiskin dan tertinggal di Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.
- ❖ Setelah mendapatkan dana desa dan mengelola BUMDES dengan maksimal, Desa Ponggok mengembangkan wisata air.
- ❖ Desa Ponggok berhasil mewujudkan 1 rumah 1 mahasiswa.
- ❖ Memberikan Rp. 100.000 kepada kaum jompo
- ❖ Merehap rumah penduduk miskin sebanyak 150 rumah.



Daftar bacaan

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sutoro Eko (Editor), *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2018)
- Ahmad Budiman, dkk, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2019)
- Debora Sanur L, *Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2019)